

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kemukus telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, meskipun masih belum mencapai tingkat keseluruhan yang diinginkan. Penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Kemukus baru sebatas pada aspek prosedural belaka. Meskipun terdapat upaya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, namun kedua prinsip tersebut belum terlaksana secara menyeluruh.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran di Desa Kemukus hanya mengikuti peraturan prosedural yang berlaku, tanpa adanya keinginan lebih lanjut dari pemerintah desa untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran desa secara lebih jauh melalui, contohnya, penyediaan rincian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes melalui media informasi berbasis elektronik yang diwujudkan melalui sistem pelaporan realisasi anggaran melalui informasi digital, minimal melalui situs web resmi milik desa, yang mana hal itu belum dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan karena kurangnya *political will* dari aparatur pemerintah desa untuk menjalankan mekanisme tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kapabilitas dari perangkat desa terkait

dalam menyikapi tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan mekanisme tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan di Desa Kemukus, yang menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemukus hanya menjadi kegiatan seremonial saja.

Kesimpulan selanjutnya adalah adanya proyek pembangunan dari pemerintah Desa yang gagal terealisasi, yaitu proyek kolam pemancingan Galatama, dan tidak adanya penjelasan dari pemerintah desa terkait kelanjutan proyek tersebut dan bungkamnya pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa, dalam menyikapi tuntutan masyarakat untuk adanya bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah desa terkait penggunaan APBDes dalam proyek tersebut, menjadi bukti penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran di Desa Kemukus belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa 2 fitur akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Schmitter, yaitu justifikasi dan kompensasi tidak terpenuhi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola anggaran di desa Kemukus. Pemerintah desa gagal dan tidak memberikan alasan yang jelas dalam perumusan sebuah kebijakan sebagai upaya menghindar dari kemungkinan adanya kompensasi dari publik atas kebijakan yang dibuat.

Selain itu, dinamika politik dalam ranah perpolitikan di Desa Kemukus juga turut mempengaruhi penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran di Desa Kemukus. Kegagalan pemerintah desa menciptakan ruang persaingan politik yang seimbang dalam mengakomodasi pihak oposisi yang muncul

sebagai akibat dari kontestasi Pilkades 2019 menyebabkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran di Desa Kemukus berjalan tanpa proses *check and balance* yang baik. Pemerintah desa gagal menyediakan dimensi *public contestations* dan *right to participate* bagi oposisi untuk hadir sebagai penyeimbang dalam konteks penyelenggaraan tata kelola anggaran desa yang demokratis.

5.2 Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menyusun tulisan ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian mendatang. Tujuan dari rekomendasi ini adalah memberikan motivasi kepada peneliti berikutnya yang mungkin akan melakukan penelitian dengan topik serupa agar hasilnya dapat lebih optimal.

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran di Desa Kemukus dalam konteks politik anggaran desa. Diperlukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa secara menyeluruh.
2. Penelitian ini menemukan adanya keterkaitan antara dinamika politik dalam konteks lokal desa yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Desa Kemukus. Namun, penelitian ini belum menjelaskan lebih jauh bagaimana dinamika politik yang terjadi mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan pemerintahan desa secara luas. Diperlukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal desa dan dampaknya terhadap pengelolaan pemerintahan desa dalam konteks yang lebih luas.

